

حضورية IMANENSI

(Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam)

Vol 2, No 2, September 2017, Hlmn. 33-44

Pusat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia

Ernawati^a

^aJurusan Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo, Indonesia 93121

^{1*}erna_unhalu@yahoo.com

Abstrak

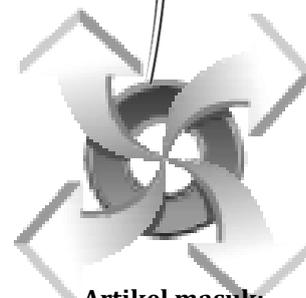
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pusat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dan menguji perbedaan daerah pertumbuhan Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Data penelitian merupakan data sekunder hasil publikasi Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan perbankan syariah berada pada Wilayah Jawa. Hal ini di justifikasi oleh hasil uji beda yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan daerah pertumbuhan pada Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada sisi lain pusat pertumbuhan perbankan tampaknya terkait dengan besarnya potensi permintaan yang diindikasikan dengan: jumlah penduduk, jumlah pekerja, dan pendapatan perkapita suatu wilayah.

Kata Kunci: Pusat Pertumbuhan; Asset; Perbankan Syariah.

Abstract

This study aims to mapping the growth center of Islamic banking in Indonesia and analizing the inequality in growth of Commercial Bank and Islamic Rural Bank. The data use secondary from publications Financial Services Authority and the Central Bureau of Statistics Indonesia in 2014. The results showed that the growth of Islamic banking center is located on Java region. This is justified by results of the different test that there were no differences in the growth area of Commercial Bank and Islamic Rural Bank. On the other hand, the central growth seem related to the magnitude of the potential demand is indicated by the number of population, number of workers, and the per capita income of a region.

Keywords: Center of Growth; Asset; Islamic Banking.



Artikel masuk:

14 April 2017

Artikel diterima:

1 September 2017



Operasionalisasi perbankan syariah di Indonesia terdiri dari tiga jenis, yaitu Bank Umum Syariah; Unit Usaha Syariah, dan bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2008, dinyatakan bahwa Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; sementara UUS merupakan adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Adapun BPRS merupakan Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbedaan mendasar ketiga jenis bank tersebut disajikan sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Bank Umum, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah

Uraian	Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Pembukaan kantor LN	Dapat membuka kantor/cabang di luar negri	Dapat membuka kantor/cabang di luar negri	Tidak dapat membuka kantor/cabang di luar negri
Pemilik	WNI, dan atau kemitraan WNI dan WNA	WNI, dan atau kemitraan WNI dan WNA	WNI
Kegiatan	Memberikan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah	Memberikan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah	Memberikan layanan perbankan sebagaimana Bank Umum Syariah, kecuali simpanan dalam bentuk giro dan lalu lintas pembayaran

Sumber: UU No 21 Tahun 2008, diringkas

Berdasarkan data OJK (2015) dari ketiga jenis bank syariah ini, BUS merupakan jenis bank syariah yang memiliki jaringan kantor terbesar; termasuk jaringannya. BUS yang hingga posisi Desember 2014 terdiri dari 12 bank; memiliki jaringan kantor sebanyak 2.151; sementara UUS beroperasi pada 22 bank memiliki 320 jaringan kantor. Adapun jumlah BPRS di Indonesia sebesar 163 dengan 439 jaringan kantor. Pada sisi lain, aset BUS dan UUS juga merajai operasionalisasi perbankan syariah di Indonesia yang mencapai hampir 98 persen. Namun hal yang cukup menggembarakan bahwa jumlah masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas layanan bank syariah semakin bertambah. Tabel 2 menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah rekening baru tercatat lebih dari dua kali lipat, baik pada BUS dan UUS maupun BPRS. Dengan demikian nasabah dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah Indonesia Lebih dari 15 juta, dan jumlah ini akan terus diupayakan mengalami peningkatan dimasa yang akan datang.

Meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat untuk menggunakan jasa layanan perbankan syariah pada gilirannya akan turut meningkatkan pertumbuhan dan skala usaha perbankan syariah. Besar harapan bahwa pertumbuhan perbankan syariah terjadi pada seluruh wilayah dan atau propinsi di Indonesia. Namun harapan ini berindikasi masih jauh dari fakta sebagaimana ketimpangan ekonomi yang terjadi antar daerah dan wilayah. Sebab perbankan berkembang mengikuti perkembangan ekonomi suatu daerah, baik ditinjau dari *demand* maupun *supplynya*. Keterkaitan antara perkembangan keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi sebagai *demand-following* telah dikaji oleh Furqani and Mulyany (2009), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mendorong perkembangan perbankan syariah. Sementara temuan Majid and Kassim (2010) memandang keterkaitan tersebut dari *supply-leading*.



Tabel 2. Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Jenis Bank
 Periode 2010-2014

Jenis	2010	2011	2012	2013	2014
BUS dan UUS	6,053,658	8,187,428	10,847,862	12,724,187	14,444,146
BPRS	558,927	681,476	787,923	907,755	1,021,776

Sumber: OJK 2015

Hasil empiris level makro lain, Shrestha and Chowdhury (2005) menunjukkan bahwa perkembangan suatu bank ditentukan oleh pertumbuhan *gross domestik products* (GDP), per kapita dan jumlah penduduk. Pada level mikro, hasil penelitian Bank Indonesia (2005) yang menunjukkan bahwa alasan utama seseorang memilih layanan bank syariah didorong oleh motif religious selain lokasi bank. Meskipun temuan BI ini berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erol and El-Bdour (1989) untuk kasus Yordania; dan Edris and Almahmeed (1997) untuk kasus Kuwait.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting untuk dikaji mengenai pusat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peta pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baik dalam bentuk bank umum (BUS dan UUS) maupun BPRS. Penelitian ini sekaligus menguji perbedaan peta pertumbuhan perbankan syariah berdasarkan jenis bank. Selanjutnya, penelitian ini juga membandingkan secara deskriptif profil ekonomi dan penduduk wilayah atau propinsi sebagai pusat pertumbuhan perbankan syariah dan wilayah/propinsi yang terbelakang.

METODE

Data penelitian merupakan data sekunder hasil publikasi Otoritas Jasa Keuangan Indonesia tahun 2013-2014 berupa data aset dan dana pihak ketiga bank untuk 33 propinsi. Guna mengetahui profil makro ekonomi daerah pusat pertumbuhan perbankan syariah, maka penelitian menggunakan data indikator ekonomi Indonesia publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2014. Analisis dilakukan merujuk pada tipologi Klassen, dengan indikator *share asset* dan pertumbuhan DPK dengan 4 kuadran sebagaimana Table 3.

Tabel 3. Indikator *Share Asset* dan Pertumbuhan DPK

Kuadran	Nama	Indikator
I	Tumbuh Pesat	SA>sa; gDPK>gdpk
II	Tertekan	SA<sa; gDPK>gdpk
III	Berkembang	SA>sa; gDPK<gdpk
IV	Terbelakang	SA<sa; gDPK<gdpk

Keterangan:

SA : *share* aset propinsi i

sa : *share* aset rata-rata nasional

gDPK : pertumbuhan DPK propinsi i

gdpk : pertumbuhan DPK nasional

Rumus *share* dan pertumbuhan dihitung melalui persamaan:

$$g = \frac{(DPK_t - DPK_{t-1})}{DPK_{t-1}} \times 100 \dots \dots \dots (1)$$

$$SA = \frac{Asset_i}{Total Aset_n} \times 100 \dots \dots \dots (2)$$



Keterangan:

- DPK_t = dana pihak ketiga tahun t
- DPK_{t-1} = dana pihak ketiga tahun t-1
- Asset_i = total aset bank pada propinsi i
- Asset_n = total aset bank secara nasional

Untuk mengetahui perbedaan pusat pertumbuhan BUS/UUS dan BPRS, maka dilakukan uji beda sampel independent, dengan hipotesis:

- H₀ = Terdapat perbedaan wilayah pusat pertumbuhan antara bank syariah dan BPRS di Indonesia
- H₁ = Tidak terdapat perbedaan wilayah pusat pertumbuhan antara bank syariah dan BPRS di Indonesia

Data uji beda bersumber dari peringkat kuadran (1= propinsi pada kuadran I; 2= propinsi pada kuadran 2; dan seterusnya). Uji beda diestimasi melalui *software* SPSS dengan uji signifikansi menggunakan alfa 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan berasal dari kata tumbuh. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, tumbuh memiliki tiga pengertian: (1) timbul (hidup) dan bertambah besar atau sempurna; (2) sedang berkembang (menjadi besar, sempurna, dsb; dan (3) timbul; terbit; terjadi (sesuatu). Pertumbuhan sendiri diartikan sebagai kata benda yaitu: hal (keadaan) tumbuh; perkembangan (kemajuan dsb). Jika kata pertumbuhan diawali dengan kata pusat (menjadi pusat pertumbuhan), maka pengertian secara ekonomi akan merujuk pada analisis Tipologi Klassen yang menempatkan wilayah/daerah tertentu pada posisi salah satu kuadran dari empat kuadran yang tersedia. Adapun indikator penempatan wilayah terdiri dari 2 (dua), yaitu: pertumbuhan x dan *share_x* wilayah i terhadap total x. Simbol x sendiri merupakan simbol variabel yang tengah dianalisis, baik pendapatan domestik regional bruto, pendapatan per kapita, dan sebagainya. Model Tipologi Klassen ini akan menempatkan daerah meenjadi wilayah dengan pertumbuhan pesat (Kuadran I); wilayah maju tapi tertekan (Kuadran II); wilayah berkembang (Kuadran III) dan wilayah tertinggal (Kuadran IV). Kajian pertumbuhan perbankan syariah melalui tipe tipologi ini menunjukkan pembagian wilayah pertumbuhan berdasarkan *growth* baik aset maupun dana pihak ketiga. Ukuran lain juga dapat dijadikan indikator dalam pertumbuhan tersebut, seperti: pangsa pasar, pembiayaan, maupun tingkat laba.

Pertumbuhan perbankan syariah tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut dapat dianalisis baik sisi supply maupun sisi demand; skala mikro maupun makro. teori standar makro yang ada menempatkan pembahasan tabungan sebagai salah satu topik yang terkait dengan dana pihak ketiga.

Melalui fondasi mikro, Neo-Keynes menempatkan pembahasan tabungan bersamaan dengan konsumsi, yang keduanya merupakan alokasi pengeluaran dari pendapatan yang diterima (sebagaimana persamaan 1). Persamaan (1) menunjukkan bahwa pada dasarnya *saving* merupakan fungsi dari tabungan, sebagaimana dengan konsumsi.

$$Y = C + S \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- Y = pendapatan
- C = konsumsi
- S = tabungan

Namun seiring dengan perkembangan manusia dan diperkenalkannya pasar uang; tabungan bukan hanya ditentukan oleh pendapatan, namun ditentukan oleh faktor lain yang telah melibatkan motif maksimisasi laba. Keynes menyatakan bahwa kesediaan seseorang untuk memegang uang tunai (karena itu tidak menyimpan di bank) didorong oleh 3 (tiga) motif; yaitu: motif transaksi, motif berjaga-jaga; dan motif



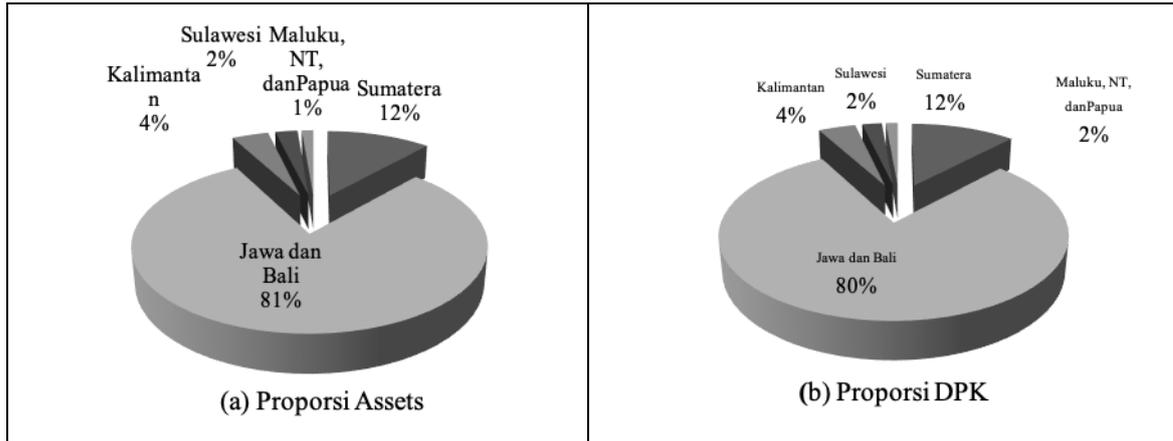
spekulasi. Motif transaksi dan berjaga-jaga (konsumsi) merupakan fungsi dari pendapatan. hal ini mengimplikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula permintaannya atas uang guna kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga.

Motif spekulasi merupakan motif pemegangan uang untuk menghasilkan laba/pendapatan. Motif spekulasi inilah yang mengarahkan manusia untuk berinvestasi pada produk-produk keuangan; baik dengan menabung melalui instrumen tabungan (giro, tabungan deposito) maupun aset keuangan lainnya (saham dan atau obligasi). Adapun fungsi dari motif spekulasi ini yaitu suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin rendah keinginan seseorang untuk memegang uang tunai; dan sebaliknya. Dengan demikian, jika dibawa dalam konteks perbankan syariah; keputusan seseorang untuk menempatkan dananya ke perbankan syariah merupakan fungsi dari bagi hasil.

Faktor lain yang mendorong seseorang menempatkan dananya pada perbankan syariah, yaitu pelayanan bank, pendapatan dan sebagainya. Menurut Alamsyah (2012) Terdapat beberapa faktor yang secara signifikan menjadi pendorong peningkatan kinerja industri perbankan syariah, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. *Pertama*, ekspansi jaringan kantor perbankan syariah mengingat kedekatan kantor dan kemudahan akses menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan nasabah dalam membuka rekening di bank syariah. *Kedua*, gencarnya program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah semakin meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat. *Ketiga*, upaya peningkatan kualitas layanan (*service excellent*) perbankan syariah agar dapat disejajarkan dengan layanan perbankan konvensional. Salah satunya adalah pemanfaatan akses teknologi informasi, seperti layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *mobile banking* maupun *internet banking*. Untuk mendukung hal ini, secara khusus Bank Indonesia mendorong bank konvensional yang menjadi induk bank syariah agar mendorong pengembangan jaringan teknologi informasi bagi BUS dan UUS yang menjadi anak usahanya.

Pertumbuhan perbankan syariah juga dipengaruhi oleh faktor pemahaman masyarakat dan kebijakan pemerintah, termasuk didalamnya sosialisasi perbankan syariah. Agustianto (2011) ada delapan (8) faktor penyebab umat Islam belum berhubungan dengan perbankan syariah pada khususnya dan lembaga keuangan syariah pada umumnya. *Pertama*, tingkat pemahaman dan pengetahuan umat tentang bank syariah masih sangat rendah. Masih banyak yang belum mengerti dan salah faham tentang bank syariah dan menganggapnya sama saja dengan bank konvensional, bahkan sebagian ustadz yang tidak memiliki ilmu yang cukup memadai tentang ekonomi Islam (ilmu ekonomi makro; moneter) masih berpandangan miring tentang bank syariah. *Kedua*, belum ada gerakan bersama dalam skala besar untuk mempromosikan bank syariah pada khususnya dan lembaga keuangan syariah pada umumnya. *Ketiga*, terbatasnya pakar dan SDM ekonomi syariah. *Keempat*, peran pemerintah masih kecil dalam mendukung dan mengembangkan ekonomi syariah. *Kelima*, peran ulama, ustadz dan da'i masih relatif kecil. *Keenam*, peran para akademisi di berbagai perguruan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Islam belum optimal. *Ketujuh*, peran ormas Islam juga belum optimal membantu dan mendukung gerakan bank syariah. Terbukti mereka masih banyak yang berhubungan dengan bank konvensional. *Kedelapan*, Bank Indonesia kurang serius dalam mengembangkan bank syariah.

Posisi Aset dan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Wilayah. Berdasarkan wilayah sebagaimana Gambar 1 proporsi tertinggi Asset perbankan syariah berada pada wilayah Jawa, yaitu sekitar 81 persen; sementara posisi kedua ditempati wilayah Sumatera, dan Kalimantan. Sementara proporsi aset perbankan syariah pada wilayah Maluku, NT dan Papua hanya sekitar 1 persen. Khusus untuk proporsi DPK, tampak pola yang sama dengan proporsi aset, sebab DPK merupakan sumber dana dari aset bank. Adapun proporsi aset dan DPK berdasarkan jenis bank disajikan sebagaimana Tabel 4.



Sumber: OJK 2015, diolah

Gambar 1 Proporsi Aset dan DPK Berdasarkan Wilayah

Tabel 4. Proporsi Aset dan DPK Berdasarkan Jenis Bank dan Wilayah

Propinsi	BUS				BPRS			
	Assets		DPK		Assets		DPK	
	Jumlah	Share	Jumlah	Share	Jumlah	Share	Jumlah	Share
Sumatera	48542,97	11,43	25363,62	11,73	1410,71	21,48	908,09	22,56
Jawa dan Bali	342797,14	80,70	173650,90	80,33	4792,60	72,98	2897,99	71,99
Kalimantan	17518,51	4,12	9396,81	4,35	40,89	0,62	28,06	0,70
Sulawesi	10563,41	2,49	4901,07	2,27	125,20	1,91	55,46	1,38
Maluku, NT, dan Papua	5347,81	1,26	2868,02	1,33	197,65	3,01	135,66	3,37
Total Indonesia	424769,84	100,00	216180,40	100,00	6567,05	100,00	4025,27	100,00

Sumber: OJK (2015), diolah

Tabel 4 menunjukkan pola penyebaran aset dan DPK per wilayah yang berbeda antara BUS/UUS dan BPRS, meskipun dengan tetap memposisikan Wilayah Jawa sebagai konsentrasi Aset dan DPK perbankan syariah. Adapun konsentrasi kedua setelah wilayah Jawa untuk BUS/UUS yaitu wilayah Sumatera, disusul wilayah Kalimantan; sementara pola penyebaran aset dan DPK pada BPRS setelah Wilayah Jawa yaitu Wilayah Sumatera; kemudian wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Sulawesi merupakan wilayah belum memiliki keunggulan dalam perbankan syariah baik BUS dan UUS maupun BPRS.

Pusat Pertumbuhan Perbankan Syariah

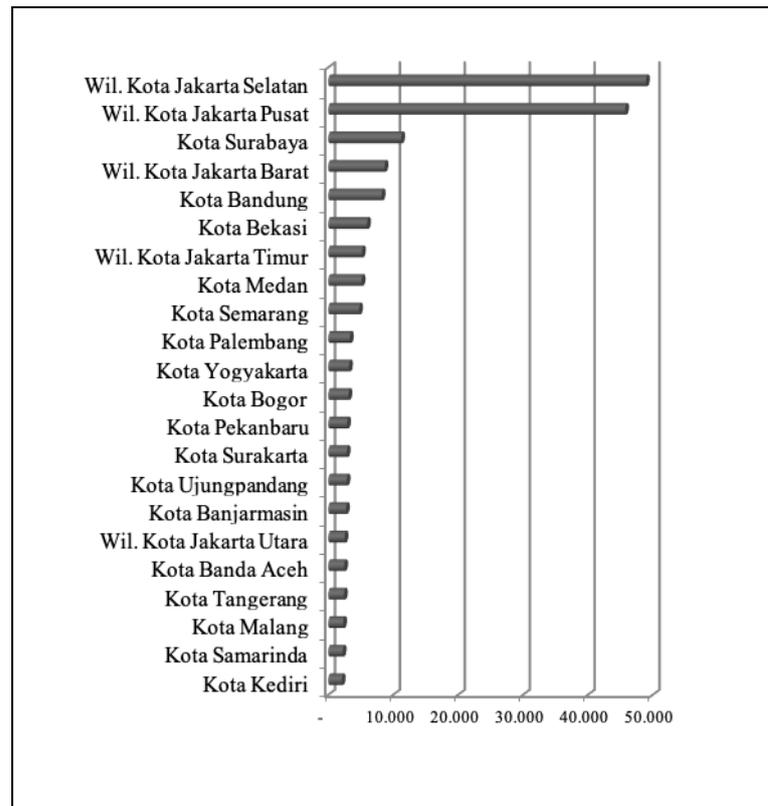
Gambar 2 menyajikan peta pertumbuhan BUS dan UUS berdasarkan propinsi di Indonesia pada tahun 2013 dan 2014. DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan propinsi dengan pertumbuhan BUS dan UUS yang pesat. Sementara Jawa Timur merupakan wilayah pertumbuhan yang tertekan ditandai dengan *share* aset yang tinggi namun mengalami pertumbuhan DPK yang rendah secara nasional. Pada sisi lain dua propinsi di wilayah Sumatera berada pada kategori berkembang (NAD dan Sumatera Barat); dan satu propinsi di Wilayah Sulawesi (Sulawesi Barat). Propinsi Maluku dan NTB pun berada pada daerah pertumbuhan berkembang. Sementara tak satupun propinsi di Wilayah Kalimantan yang berada pada daerah pertumbuhan I, II, dan III. Hal yang menarik dari temuan ini, bahwa beberapa propinsi sebagai pusat perputaran ekonomi diwilayahnya termasuk dalam wilayah pertumbuhan tertinggal, seperti propinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat roda ekonomi di Wilayah Sulawesi.

Growth DPK

(III) Jawa Timur	(I) DKI, Jabar, Jateng	Share Assets
(IV) Propinsi Lainnya	(III) NAD, Sumut, Sulbar, Maluku, NTB	

Gambar 2 Peta Pertumbuhan BUS dan UUS Indonesia

Selanjutnya jika dikaji lebih lanjut mengenai 10 kabupaten/kota yang menjadi tumpuan perkembangan DPK BUS dan UUS pada seluruh propinsi di Indonesia, tampak bahwa BUS dan UUS bertumpu pada wilayah kota, dengan kota Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat sebagai tumpuan utama sumber dana pihak ketiga perbankan syariah sebagaimana disajikan pada Gambar 3. Disusul selanjutnya oleh Kota Surabaya, Kota Bandung dan Jakarta Barat. Jika diamati data pada Gambar 3, tampak bahwa sampai peringkat 10 besar, kota dengan DPK terbesar masih didominasi kota di wilayah Jawa, kecuali Kota Medan dan Palembang yang masing-masing menempati posisi ke 8 dan 10.



Sumber: OJK, 2015 diolah

Gambar 3. Peringkat Kota/Kabupaten dengan DPK Di Atas Rata-rata Nasional

Selanjutnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki target pasar pada usaha menengah kebawah. Berbeda halnya dengan BUS dan UUS yang memiliki target pasar pada wilayah perkotaan, BPRS memiliki target pada wilayah pedesaan sebagai ceruk pasar dari BUS/UUS. Pusat pertumbuhan BPRS di Indonesia



berdasarkan propinsi sebagaimana disajikan pada Gambar 4 berada pada Propinsi Bangka Belitung, Lampung, Jawa Tengah, Banten, DIY, dan Jawa Timur. Pada sisi lain, propinsi yang potensial untuk pengembangan BPRS atau daerah yang berada pada kuadran II dan III yaitu Jawa Barat, Maluku, NTB, NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Riau.

Berdasarkan peta pertumbuhan BUD/UUS dan BPRS tampak bahwa beberapa propinsi yang masih berada pada daerah terbelakang dalam pertumbuhan perbankan syariah yaitu: Seluruh propinsi di wilayah Sulawesi kecuali Sulawesi barat, seluruh propinsi di Wilayah Kalimantan, Jambi, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat, Nusa Tenggara Timur dan Bali.

Growth DPK

(III) Jawa Barat, Malut, NTB	(I) Babel, Lampung, Jateng, Banten, DIY, Jatim	Share Assets
(IV) Propinsi Lainnya	(II) NAD, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau	

Gambar 4. Peta Pertumbuhan BPRS Indonesia

Perbedaan Pusat Pertumbuhan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Hasil uji beda pusat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia disajikan sebagaimana Tabel 5. Tabel 5 menunjukkan bahwa secara rata-rata Indonesia, baik pada jenis BUS/UUS maupun BPRS propinsi Indonesia berada pada wilayah III atau berkembang, sebagaimana yang diindikasikan dengan nilai rata-rata Bank Umum sebesar 3,424; sementara nilai rata-rata Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebesar 3,121.

Tabel 5 Hasil Estimasi Uji Beda

Jenis Bank	Mean	Standar Deviasi	Standar Error Mean
Bank Umum	3,424	1,031	0,180
Bank Pembiayaan	3,121	1,192	0,208
F= 1,887			
Sig. 0,174			

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Nilai uji F hasil estimasi sebesar 1,887 dengan signifikansi 0,174 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan atas daerah pusat pertumbuhan antara Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hal ini telah menjustifikasi bahwa pusat pertumbuhan perbankan syariah baik Bank Umum maupun Bank pembiayaan berada pada Wilayah Jawa.

Deskripsi Profil Ekonomi dan Penduduk Wilayah Jawa. Peta pusat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sebagaimana pembahasan sebelumnya menunjukkan lebih terpusat pada wilayah Jawa dan Sumatera, dan secara khusus perkembangan BUS dan UUS masih didominasi pada wilayah ibukota Jakarta. Beberapa faktor yang berpotensi mendorong perkembangan *massiv* perbankan syariah pada propinsi DKI Jakarta khususnya; dan Wilayah Jawa umumnya yaitu jumlah faktor roda ekonomi dan penduduk. Tabel 5 menyajikan perbandingan pusat pertumbuhan perbankan dengan wilayah lain di Indonesia, yaitu Sulawesi dan Papua sebagai lima propinsi



dengan pertumbuhan tertinggi. Selain perbedaan yang mencolok dari aspek pertumbuhan ekonomi, juga tampak bahwa pusat pertumbuhan perbankan syariah memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi bahwa 45 juta penduduk lebih berada di propinsi Jawa Barat, menyusul Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tingginya jumlah penduduk di Pulau Jawa, berdampak pada tingginya jumlah pekerja, yang pada akhirnya mendorong pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita tertinggi dimiliki oleh ibu kota negara sebesar 40 juta lebih, disusul Jawa Timur. Sementara pendapatan per kapita Jawa Barat dan Jawa Tengah masih berada di bawah Sulawesi Utara dan Papua Barat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mendorong berkembangnya perbankan syariah di wilayah Jawa yaitu tingginya potensi permintaan jasa layanan bank yang ditunjukkan oleh jumlah penduduk, dan jumlah pekerja serta pendapatan perkapita. Pertumbuhan ekonomi tampaknya tidak terkait langsung dengan perkembangan sektor perbankan, sebab pertumbuhan ekonomi menggambarkan kemajuan pendapatan pada suatu wilayah, bukan pada angka besarnya jumlah harta/pendapatan yang beredar pada wilayah tersebut.

Pada sisi lain, sebagai pusat kependudukan, Wilayah Jawa juga menjadi pusat pendidikan Islam, yang diharapkan memberi kontribusi pada syiar produk perbankan Islam. Meskipun demikian, tampak tidak ada kaitan antara besarnya skala pendidikan Islam dengan kemajuan perbankan syariah. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi DKI Jakarta sebagai pusat pertumbuhan perbankan syariah justru memiliki jumlah pelajar dan mahasiswa serta tenaga edukatif lingkup Kementerian Agama (Kemenag) yang jauh lebih rendah di banding propinsi lain di wilayah Jawa. Bahkan jumlah ini masih dibawah Propinsi Sulawesi Selatan, yang sebagaimana pembahasan sebelumnya termasuk dalam kategori wilayah tertinggal. Hal ini juga menunjukkan bahwa target pasar perbankan syariah tidak terbatas pada kelompok tertentu, namun membuka diri bagi kemaslahatan umat manusia secara umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan perbankan syariah baik Bank Umum maupun BPRS bertumpu pada wilayah Jawa. Meskipun demikian, kategori propinsi secara umum dalam pertumbuhan perbankan syariah berada pada kategori berkembang, yang dicirikan dengan: pertumbuhan perbankan syariah yang diatas rata-rata nasional; namun memiliki share aset yang masih rendah. Rendahnya *share* ini dapat didorong oleh faktor: (1) rendahnya investasi baru pada perbankan syariah; dan (2) rendahnya dana pihak ketiga dan kas perusahaan; (3) lambatnya perputaran pembiayaan akibat kredit bermasalah; dan (4) rendahnya tingkat profitabilitas perbankan syariah.

Rendahnya investasi baru baik dalam bentuk penyeteran modal maupun investasi aktiva tetap menunjukkan rendahnya *supply* layanan bank pada propinsi wilayah berkembang dan tertinggal. Pada sisi lain, rendahnya DPK juga sangat mempengaruhi besarnya aset suatu wilayah, sebab meskipun DPK ini merupakan kewajiban bank, namun kemudian akan disalurkan menjadi pembiayaan sehingga bertransformasi sebagai aktiva dalam bentuk piutang pembiayaan. Jika pengembalian pembiayaan tergolong lancar, maka akan mendorong pembentukan aktiva dalam bentuk kas, tentunya diiringi tingkat cadangan kredit bermasalah yang rendah. Tingkat profitabilitas juga sangat mempengaruhi besarnya aktiva perbankan baik yang bersumber dari pendapatan utama (pembiayaan), maupun melalui jasa perbankan lainnya. Laporan OJK (2015) menunjukkan bahwa peningkatan aset terbesar pada BUS dan UUS setidaknya untuk waktu lima tahun terakhir, yaitu pada rekening pembiayaan dan rekening antar kantor aktiva. Sementara dari aspek pasiva yaitu DPK dan antar kantor pasiva. Dengan demikian, DPK menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan sebuah bank. Hal ini juga di justifikasi dari temuan penelitian bahwa proporsi aset dan DPK baik pada BUS/UUS maupun pada BPRS adalah relatif sama.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu propinsi tidak serta merta terkait dengan perkembangan perbankan syariah. Sebab seluruh propinsi yang berada pada wilayah Sulawesi merupakan propinsi dengan tingkat diatas pertumbuhan rata-rata nasional, bahkan tertinggi secara nasional; termasuk juga propinsi Papua Barat, namun dalam perkembangan perbankan



syariah secara umum berada pada wilayah IV (tertinggal). Temuan penelitian tidak sejalan dengan Shrestha and Chowdhury (2005). Meskipun demikian, temuan ini juga mengkonfirmasi hasil yang diperoleh Shrestha and Chowdhury (2005) jika menggunakan variabel jumlah penduduk juga menjadi potensi bagi permintaan layanan perbankan syariah.

Tabel 6 Ringkasan Profil Beberapa Propinsi

Propinsi	Jumlah Penduduk 2013e (000)	Jumlah Pekerja	PDB Perkapita 2010 Harga Konstan (000 rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi			MA 2012 / 2013	Mahasiswa (Kemenag)	Tenaga Edu (Kemenag)
				2010	2011*	2012**			
DKI	9.969,9	4.712.836	40.915,5	6,50	6,73	6,53	87	12.934	1.243
Jawa Barat	45.340,8	18.413.984	7.242,7	6,20	6,48	6,21	856	40.134	3.208
Jawa Tengah	33.264,3	15.964.048	5.440,2	5,84	6,03	6,34	560	53.720	2.402
Jawa Timur	38.362,2	19.266.457	9.057,5	6,68	7,22	7,27	1.389	128.723	5.209
5 Provinsi dengan Pertumbuhan tertinggi									
Sulawesi Tengah	2.785,5	1.175.930	6.549,5	8,74	9,15	9,27	159	5.518	399
Sulawesi Utara	2.360,4	946.852	8.047,4	7,16	7,39	7,86	21	1.212	69
Sulawesi Tenggara	2.396,7	968.949	5.196,4	8,22	8,96	10,41	109	4.327	360
Sulawesi Selatan	8.342,0	3.291.280	6.334,8	8,19	7,61	8,37	328	36.934	1.917
Papua Barat	828,3	353.619	7.727,6	28,47	27,08	15,84	12	1.008	55
Total Indonesia	248.818,1	110.804.041	9.320,0	6,14	6,35	6,30	6.728	601.312	30.979

Sumber: BPS berbagai tahun, disusun kembali

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu propinsi tidak serta merta terkait dengan perkembangan perbankan syariah. Sebab seluruh propinsi yang berada pada wilayah Sulawesi merupakan propinsi dengan tingkat diatas pertumbuhan rata-rata nasional, bahkan tertinggi secara nasional; termasuk juga propinsi Papua Barat, namun dalam perkembangan perbankan syariah secara umum berada pada wilayah IV (tertinggal). Temuan penelitian tidak sejalan dengan Shrestha and Chowdhury (2005). Meskipun demikian, temuan ini juga mengkonfirmasi hasil yang diperoleh Shrestha and Chowdhury (2005) jika menggunakan variabel jumlah penduduk juga menjadi potensi bagi permintaan layanan perbankan syariah.

Selanjutnya, besarnya jumlah sekolah/ perguruan tinggi berlatar belakang agama yang diharapkan menjalin kemitraan dengan perbankan syariah dalam upaya sosialisasi produk keuangan syariah ternyata tidak terkait dengan perkembangan perbankan syariah itu sendiri. hal ini sejalan dengan penelitian Erol and El-Bdour (1989) untuk kasus Yordania dan Edris and Almahmeed (1997) untuk kasus Kuwait. Erol and El-Bdour (1989) menemukan bahwa motif religius bukanlah merupakan pertimbangan utama konsumen untuk menjadi pelanggan perbankan syariah; namun yang paling penting yaitu pelayanan yang cepat, efisien serta reputasi bank.



SIMPULAN

Pertumbuhan BUS dan UUS berpusat pada propinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pertumbuhan BPRS berpusat pada Banten, Jawa Tengah, DIY, Bangka Belitung dan Lampung. Pada sisi lain, propinsi yang potensial dalam pengembangan perbankan syariah baik BUS/UUS dan BPRS yaitu NAD, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Maluku Utara, NTB, Maluku, dan Sulawesi Barat. Tidak dapat perbedaan signifikan pola pertumbuhan pada BUS/UUS dan BPRS, yang menjustifikasi bahwa pusat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia bertumpu pada wilayah Jawa. Secara deskriptif pusat pertumbuhan perbankan syariah pada wilayah Jawa sangat terkait dengan indikator kepadatan penduduk, jumlah pekerja, dan pendapatan perkapita. Namun pertumbuhan tersebut tidak terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah mahasiswa/pelajar/tenaga edukatif yang berlatar belakang pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. & Omar, M. 2012. Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35-47.
- Abdul Gofur Anshori. 2009. *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama
- Agustianto. 2011. Strategi Jitu Meningkatkan Market Share Bank Syariah. <http://www.agustiantocentre.com/?p=436>. Download 1 Agustus 2015.
- Alamsyah, Halim. 2012. Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: *Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015*. Makalah Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012
- Arthukorala, P. and Sen, K. 2004. The Determinants of Private Savings in India, *World Development* 32(3): 491-503.
- Bank Indonesia. 2005 *Pemetaan Hasil Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Indonesia*, Jakarta.
- BPS. 2012. *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2013. *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2014. *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Edris, T. A. and Almahmeed, M.A. 1997. Services Considered Important To Business Customers and Determinants of Bank Selection in Kuwait: A Segmentation Analysis, *International Journal of Bank Marketing* 15(4): 126-133.
- Erol, C. and El-Bdour, R. 1989. Attitudes, Behavior, and Patronage Factors of Bank Customers towards Islamic Banks, *International Journal of Bank Marketing* 7(6):31-37.
- Farahani et al. 2012. Analysis of Islamic Bank's Financing and Economic Growth: Case Study Iran and Indonesia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 33 (4) 1-24
- Furqani, H. & Mulyany, R. 2009. Islamic Banking and Economic Growth: Empirical Evidence from Malaysia, *Journal of Economic Cooperation*, 30(2), 59-74.
- OJK. 2015. *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Kasmir. 2009. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prenada Media
- Kar, M., Nazlioglu, S. & Agir, H. 2011. Financial Development and Economic Growth nexus in the MENA countries: Bootstrap Panel Granger Causality Analysis, *Econometric Modelling*, 28(1-2), 685-693.
- Majid, Shabri A. and Kassim, Salina. 2010. Islamic finance and economic growth: The Malaysian experience. *Paper dipresentasikan pada Forum Keuangan Islam* di Kuala Lumpur, 2-5 August 2010.
- Masson, P. R., Bayoumi, T., and Samiei, H. 1998. International Evidence on the Determinants of Private Saving, *The World Bank Economic Review* 12(3):483-501.
- Sadono Sukirno. 2010. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press



- Shrestha, M. B. and Chowdhury, K. 2005. *ARDL Modeling Approach to Testing the Financial Liberalization Hypothesis*, University of Wollongong, Economics Working Paper Series 05-15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.